



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 22 Februari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
UNIT KERJA : DINAS SOSIAL

I. DATA PRIBADI

1. Nama : RESTU NOVI WIDIANI
2. Jabatan : KEPALA DINAS
3. NHK : 758454

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 8.100.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 138 m2/145 m2 di KAB / KOTA KOTA SURABAYA , HASIL SENDIRI Rp. 2.125.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 140 m2/145 m2 di KAB / KOTA KOTA SURABAYA , HASIL SENDIRI Rp. 2.125.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 233 m2/150 m2 di KAB / KOTA BANDUNG, HASIL SENDIRI Rp. 1.625.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 120 m2/240 m2 di KAB / KOTA KOTA SURABAYA , HASIL SENDIRI Rp. 2.225.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 230.000.000

1. MOTOR, VESPA SPRINT I GET 150 ABS AT Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 30.000.000
2. MOBIL, MITSUBHISI XPANDER 1.5 L SPORT Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 242.700.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 1.931.836.143

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 10.504.536.143

III. HUTANG Rp. 180.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 10.324.536.143



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 19 Februari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR

UNIT KERJA : DINAS SOSIAL

I. DATA PRIBADI

1. Nama : YUSMANU
2. Jabatan : SEKRETARIS
3. NHK : 653082

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. ----

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 190.500.000

1. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2017, HASIL SENDIRI
Rp. 5.000.000
2. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR BEBEK Tahun 2010, HASIL
SENDIRI Rp. 1.500.000
3. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR BEBEK Tahun 2015, HASIL
SENDIRI Rp. 4.000.000
4. MOBIL, HONDA CRV Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp.
180.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. ----

D. SURAT BERHARGA

Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 77.545.219

F. HARTA LAINNYA

Rp. ----

Sub Total

Rp. 268.045.219

III. HUTANG

Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 268.045.219

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara



Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 27 Februari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR

UNIT KERJA : DINAS SOSIAL

I. DATA PRIBADI

1. Nama : SUKARDI
2. Jabatan : KEPALA BIDANG
3. NHK : 652863

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 800.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 105 m2/200 m2 di KAB / KOTA
SIDOARJO, HASIL SENDIRI Rp. 800.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 317.000.000

1. MOTOR, HONDA/PCX V1J02Q50L1 A/T Tahun 2023, HASIL
SENDIRI Rp. 28.000.000
2. MOTOR, YAMAHA BBS T Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp.
24.000.000
3. MOBIL, TOYOTA / RUSH MINIBUS/MOBIL PENUMPANG Tahun
2024, HASIL SENDIRI Rp. 265.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ----

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 8.712.098

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 1.125.712.098

III. HUTANG Rp. 161.650.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 964.062.098

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara



Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 25 Februari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR

UNIT KERJA : DINAS SOSIAL

I. DATA PRIBADI

1. Nama : MUCHAMAD ARIF ARDIANSYAH
2. Jabatan : KEPALA BIDANG
3. NHK : 955219

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	750.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 90 m2/50 m2 di KAB / KOTA SIDOARJO, HASIL SENDIRI Rp. 750.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	2.500.000
1. MOTOR, YAMAHA MIO Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp. 2.500.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	23.500.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	158.353.690
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	934.353.690
III. HUTANG	Rp.	795.800.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	138.553.690

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 25 Februari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
UNIT KERJA : DINAS SOSIAL

I. DATA PRIBADI

1. Nama : HAZIZAH
2. Jabatan : KEPALA BIDANG
3. NHK : 939292

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	600.000.000
1. Tanah Seluas 105 m2 di KAB / KOTA KOTA SURABAYA , HASIL SENDIRI Rp. 600.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	805.000.000
1. MOBIL, TOYOTA MINIBUS Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000		
2. MOBIL, TOYOTA MINIBUS Tahun 2024, HASIL SENDIRI Rp. 405.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	13.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	230.714.863
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	1.648.714.863
III. HUTANG	Rp.	1.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.647.714.863

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan



Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 4 Februari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR

UNIT KERJA : DINAS SOSIAL

I. DATA PRIBADI

1. Nama : AGUNG PAMBUDI
2. Jabatan : KEPALA UPT
3. NHK : 652243

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. 1.870.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 90 m2/90 m2 di KAB / KOTA JEMBER, HASIL SENDIRI Rp. 450.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 238 m2/185 m2 di KAB / KOTA JEMBER, HASIL SENDIRI Rp. 685.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 55 m2/55 m2 di KAB / KOTA KOTA MALANG , HASIL SENDIRI Rp. 385.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 200 m2/58.26 m2 di KAB / KOTA JEMBER, HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 232.000.000

1. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000
2. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000
3. MOBIL, TOYOTA KIJANG INNOVA G XS42 DS Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 97.000.000
4. MOBIL, TOYOTA YARIS 1.5 S MT Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 115.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. ----

D. SURAT BERHARGA

Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 262.177.814



F. HARTA LAINNYA

Sub Total

Rp. ----
Rp. 2.364.177.814

III. HUTANG

Rp. ----
Rp. 2.364.177.814

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 18 Februari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR

UNIT KERJA : DINAS SOSIAL

I. DATA PRIBADI

- Nama : ANA SUKISWATI
- Jabatan : KEPALA UPT
- NHK : 857819

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 2.100.000.000

- Tanah dan Bangunan Seluas 60 m2/60 m2 di KAB / KOTA SIDOARJO, HASIL SENDIRI Rp. 575.000.000
- Tanah Seluas 409 m2 di KAB / KOTA BLITAR, HASIL SENDIRI Rp. 325.000.000
- Tanah dan Bangunan Seluas 98 m2/98 m2 di KAB / KOTA KOTA MALANG , HASIL SENDIRI Rp. 875.000.000
- Tanah dan Bangunan Seluas 122 m2/98 m2 di KAB / KOTA BOJONEGORO, HIBAH TANPA AKTA Rp. 325.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 177.000.000

- MOBIL, HONDA HRV RU1 Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 175.000.000
- MOTOR, HONDA BEBEK Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 2.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 18.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 320.543.003

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 2.615.543.003

III. HUTANG Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 2.615.543.003



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 19 Februari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR

UNIT KERJA : DINAS SOSIAL

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **BABAN SOBANDI**
2. Jabatan : **KEPALA UPT**
3. NHK : **638050**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. ----

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 457.000.000

1. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp.
7.000.000
2. MOBIL, INNOVA ZENIX V HYBIRD Tahun 2023, HASIL SENDIRI
Rp. 450.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. 1.000.000

D. SURAT BERHARGA

Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 249.249.153

F. HARTA LAINNYA

Rp. ----

Sub Total

Rp. 707.249.153

III. HUTANG

Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 707.249.153

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 20 Januari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR

UNIT KERJA : DINAS SOSIAL

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **BAIQ LILIK SRI SUMARTINI AK.S**
2. Jabatan : **KEPALA UPT**
3. NHK : **809405**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	750.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 115 m2/36 m2 di KAB / KOTA KOTA MALANG , HASIL SENDIRI Rp. 750.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	154.300.000
1. MOTOR, HONDA HONDA/NF 125TR Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp. 7.300.000		
2. MOBIL, TOYOTA KJG INNOVA G XW42 Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 147.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	43.800.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	7.976.175
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	956.076.175
III. HUTANG	Rp.	16.911.545
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	939.164.630

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan



Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 13 Februari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR

UNIT KERJA : DINAS SOSIAL

I. DATA PRIBADI

1. Nama : BUDIHARJO
2. Jabatan : KEPALA UPT
3. NHK : 948623

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 700.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 112 m2/45 m2 di KAB / KOTA
SIDOARJO, HASIL SENDIRI Rp. 700.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 114.000.000

1. MOBIL, TOYOTA AVANZA Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp.
85.000.000
2. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp.
6.500.000
3. MOTOR, YAMAHA XRIDE Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp.
7.500.000
4. MOTOR, HONDA SCOOPY Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp.
15.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 17.750.000

D. SURAT BERTAHAP Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 28.380.706

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 860.130.706

III. HUTANG Rp. 83.333.333

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 776.797.373

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 6 Maret 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR

UNIT KERJA : DINAS SOSIAL

I. DATA PRIBADI

- Nama : CHOLIK HIDAYAT
- Jabatan : KEPALA UPT
- NHK : 981793

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	1.750.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 165 m2/180 m2 di KAB / KOTA KOTA SURABAYA , HASIL SENDIRI Rp. 1.750.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	237.000.000
1. MOBIL, HONDA HRV Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 210.000.000		
2. MOTOR, VESPA VESPA Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 27.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	135.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	21.000.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	2.143.000.000
III. HUTANG	Rp.	20.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	2.123.000.000

Catatan:

- Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan



Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 25 Februari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
UNIT KERJA : SEKRETARIAT DAERAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : FIRDAUS ARDISTYA HUTAMA
2. Jabatan : KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
3. NHK : 947228

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	2.060.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 153 m2/200 m2 di KAB / KOTA SIDOARJO, HASIL SENDIRI Rp. 1.625.000.000		
2. Tanah dan Bangunan Seluas 42 m2/90 m2 di KAB / KOTA SIDOARJO, HASIL SENDIRI Rp. 435.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	318.000.000
1. MOBIL, TOYOTA INNOVA Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 280.000.000		
2. MOTOR, HONDA VESPA Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 38.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	36.593.888
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	55.362.413
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	2.469.956.301
III. HUTANG	Rp.	2.096.778.603
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	373.177.698

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara



Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 12 Februari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR

UNIT KERJA : DINAS SOSIAL

I. DATA PRIBADI

1. Nama : FIVTIAN WINDARTA
2. Jabatan : KEPALA UPT
3. NHK : 649819

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 2.221.500.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 72 m2/72 m2 di KAB / KOTA KOTA SURABAYA , HASIL SENDIRI Rp. 1.500.000
2. Tanah Seluas 104 m2 di KAB / KOTA BANYUWANGI, HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 104 m2/289 m2 di KAB / KOTA BANYUWANGI, HASIL SENDIRI Rp. 320.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 120 m2/140 m2 di KAB / KOTA KOTA SURABAYA , HASIL SENDIRI Rp. 1.500.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 880.000.000

1. MOBIL, TOYOTOYOTTOYOTA FORTUNEFOR Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 460.000.000
2. MOBIL, TOYOTA KIJANG Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 380.000.000
3. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 15.000.000
4. MOTOR, YAMAHA AEROX Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 25.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 2.135.200.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ---

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 635.000.000



F. HARTA LAINNYA

Rp. 155.000.000

Sub Total

Rp. 6.026.700.000

III. HUTANG

Rp. 885.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 5.141.700.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 4 Februari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR

UNIT KERJA : DINAS SOSIAL

I. DATA PRIBADI

1. Nama : IMRON JOESOEUF JOELINAR
2. Jabatan : KEPALA UPT
3. NHK : 652631

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 270.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 96 m2/96 m2 di KAB / KOTA BANGKALAN, HASIL SENDIRI Rp. 270.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 210.800.000

1. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 7.800.000
2. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 7.000.000
3. MOBIL, TOYOTA INNOVA Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 180.000.000
4. MOTOR, YAMAHA 2DP Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 16.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ----

D. SURAT BERTAHAP Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 930.274.938

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 1.411.074.938

III. HUTANG Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 1.411.074.938

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 4 Maret 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR

UNIT KERJA : DINAS SOSIAL

I. DATA PRIBADI

- Nama : ISVAN DANIEL ANANTA
- Jabatan : KEPALA UPT
- NHK : 956355

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	2.000.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 545 m2/545 m2 di KAB / KOTA KOTA SURABAYA , Rp. 2.000.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	60.000.000
1. MOBIL, ISUZU KUDA MITSUBISHI Tahun 2005, HASIL SENDIRI Rp. 60.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	20.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	41.855
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	2.080.041.855

III. HUTANG **Rp.** **44.000.000**

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) **Rp.** **2.036.041.855**

Catatan:

- Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 6 Maret 2025/Khusus - Awal Menjabat)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR

UNIT KERJA : DINAS SOSIAL

I. DATA PRIBADI

1. Nama : KUSUMA ATMADJA,
2. Jabatan : KEPALA UPT
3. NHK : 1007803

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 750.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 105 m2/84 m2 di KAB / KOTA SIDOARJO, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 84 m2/70 m2 di KAB / KOTA SIDOARJO, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 191.500.000

1. MOBIL, SUZUKI ERTIGA DREZA Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 160.000.000
2. MOTOR, HONDA PCX Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 28.000.000
3. MOTOR, HONDA NF 100 ASTREA SUPRA Tahun 1999, HASIL SENDIRI Rp. 3.500.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 200.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 289.300.000

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 1.430.800.000

III. HUTANG Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 1.430.800.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 20 Januari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR

UNIT KERJA : DINAS SOSIAL

I. DATA PRIBADI

1. Nama : NENTI SARJANTI
2. Jabatan : KEPALA UPT
3. NHK : 838921

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 600.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 98 m2/45 m2 di KAB / KOTA KOTA MADIUN , HASIL SENDIRI Rp. 600.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 613.000.000

1. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 13.000.000
2. MOBIL, TOYOTA KIJANG INNOVA 24 V A/T Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000
3. MOBIL, NISSAN MAGNITE Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 2.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 200.500.000

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 816.100.000

III. HUTANG Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 816.100.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara



Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



**PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 11 Februari 2025/Khusus - Akhir Menjabat)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR

UNIT KERJA : DINAS SOSIAL

I. DATA PRIBADI

1. Nama : PITONO
2. Jabatan : KEPALA UPT
3. NHK : 652580

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.200.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 72 m2/72 m2 di KAB / KOTA KOTA SURABAYA , HASIL SENDIRI Rp. 1.100.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 72 m2/72 m2 di KAB / KOTA TUBAN, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 125.000.000

1. MOTOR, HONDA SCOOPY Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 15.000.000
2. MOBIL, TOYOTA AVANZA Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 110.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ----

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 5.021.451

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 1.330.021.451

III. HUTANG Rp. 182.500.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 1.147.521.451

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara



Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 12 Februari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
UNIT KERJA : DINAS SOSIAL

I. DATA PRIBADI

1. Nama : RACHMAT ARIF
2. Jabatan : KEPALA UPT
3. NHK : 955456

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **1.200.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 91 m2/36 m2 di KAB / KOTA
SIDOARJO, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 169 m2/73 m2 di KAB / KOTA
SIDOARJO, HASIL SENDIRI Rp. 700.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **249.000.000**

1. MOBIL, HONDA SEDAN Tahun 2005, HASIL SENDIRI Rp.
60.000.000
2. MOBIL, TOYOTA CALYA MINIBUS Tahun 2020, HASIL SENDIRI
Rp. 160.000.000
3. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp.
5.000.000
4. MOTOR, HONDA CB 150R Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp.
17.000.000
5. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp.
7.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp.** **----**

D. SURAT BERHARGA **Rp.** **----**

E. KAS DAN SETARA KAS **Rp.** **263.994.561**

F. HARTA LAINNYA **Rp.** **----**

Sub Total **Rp.** **1.712.994.561**



III. HUTANG

Rp. 234.804.108

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 1.478.190.453

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 2 Januari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR

UNIT KERJA : DINAS SOSIAL

I. DATA PRIBADI

1. Nama : SINGGIH TRI WIMBANU
2. Jabatan : KEPALA UPT
3. NHK : 857638

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	85.000.000
1. Tanah Seluas 634 m2 di KAB / KOTA BOJONEGORO, HASIL SENDIRI Rp. 85.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	87.000.000
1. MOBIL, SUZUKI MINIBUS Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 80.000.000		
2. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 7.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	----
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	60.550.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	232.550.000
III. HUTANG	Rp.	100.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	132.550.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan



Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 23 Januari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR

UNIT KERJA : DINAS SOSIAL

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **SRI MARIYANI**
2. Jabatan : **KEPALA UPT**
3. NHK : **947491**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.100.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 187 m2/187 m2 di KAB / KOTA
SIDOARJO, HASIL SENDIRI Rp. 1.100.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 124.000.000

1. MOTOR, HONDA F1C02N46L0AT Tahun 2020, HASIL SENDIRI
Rp. 8.000.000
2. MOTOR, HONDA L 1K02Q33L1A/T Tahun 2022, HASIL SENDIRI
Rp. 18.000.000
3. MOBIL, TOYOTA NEW AVANZA 1,3E MT Tahun 2014, HASIL
SENDIRI Rp. 85.000.000
4. MOTOR, HONDA K1H02N14L0AT Tahun 2016, HASIL SENDIRI
Rp. 13.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ----

D. SURAT BERTAGIH Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 269.456.847

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 1.493.456.847

III. HUTANG Rp. 25.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 1.468.456.847

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpnp.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpnp.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 20 Januari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
UNIT KERJA : DINAS SOSIAL

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **TEGUH SETYAWAN**
2. Jabatan : **KEPALA UPT**
3. NHK : **852662**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	345.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 67 m2/6 m2 di KAB / KOTA SIDOARJO, HASIL SENDIRI Rp. 155.000.000		
2. Tanah dan Bangunan Seluas 6 m2/16 m2 di KAB / KOTA SIDOARJO, HASIL SENDIRI Rp. 190.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	157.750.000
1. MOTOR, YAMAHA SEPEDA MOTOR Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 5.500.000		
2. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 2.250.000		
3. MOBIL, MITSHUBISI EXPANDER Tahun 2024, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	14.630.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	241.000.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	758.380.000
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	758.380.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 7 Maret 2025/Khusus - Awal Menjabat)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR

UNIT KERJA : DINAS SOSIAL

I. DATA PRIBADI

- Nama : A. YUDHOKISWORO
- Jabatan : KEPALA UPT
- NHK : 997426

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	1.407.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 1005 m2/800 m2 di KAB / KOTA TULUNGAGUNG, WARISAN Rp. 1.407.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	20.000.000
1. MOTOR, YAMAHA AEROX Tahun 2023, LAINNYA Rp. 20.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	----
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	29.160.008
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	1.456.160.008
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.456.160.008

Catatan:

- Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 7 Maret 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
UNIT KERJA : DINAS SOSIAL

I. DATA PRIBADI

1. Nama : MOHAMAD ZUSRON ANSORI
2. Jabatan : KEPALA UPT
3. NHK : 948519

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.250.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 84 m2/84 m2 di KAB / KOTA KOTA KEDIRI , HASIL SENDIRI Rp. 450.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 152 m2/152 m2 di KAB / KOTA KOTA KEDIRI , HASIL SENDIRI Rp. 800.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 158.500.000

1. MOBIL, TOYOTA AVANZA 1.3 G M/T Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 130.000.000
2. MOTOR, YAMAHA 350 Tahun 2006, HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000
3. MOTOR, YAMAHA 1FDC Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 7.000.000
4. MOTOR, YAMAHA B3W A/T Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 17.500.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 38.400.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 851.990.992

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 2.298.890.992

III. HUTANG Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 2.298.890.992



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.